

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Kabupaten Bengkalis. Data penelitian diperoleh dari BPKAD Kabupaten Bengkalis sebagai pengelola bidang asset Pemkab Bengkalis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengamanan barang milik daerah (BMD) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum yang dilakukan oleh BPKAD Bengkalis sudah sesuai dengan peraturan yang digunakan yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan perwujudan pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait pengamanan BMD belum akuntabel, hal ini dikarenakan belum terpenuhi salah satu dari aspek akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

**Kata Kunci :** Implementasi, Pengamanan Barang Milik Daerah, Akuntabilitas.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of securing regional property in realizing accountability in Bengkalis Regency. The research data was obtained from the BPKAD Bengkalis Regency as the manager of the government asset sector Bengkalis Regency. Techniques in this study is data collection are interviews and documentation. The type of data used in this study is descriptive qualitative data. The results of this study are implementation of securing regional property including administrative security of physical security and legal security carried out by the BPKAD Bengkalis is in accordance with the regulations used namely Permendagri Number 19 Of 2016 and the embodiment of the Bengkalis Regency government regarding BMD security is not yet accountable, this is because the one aspects of accountability have not been fulfilled, namely accountability vertical and accountability horizontal.*

**Keywords :** *Implementation, Security Of Regional Property, Accountability.*